

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Implementasi pembangunan daerah memiliki peran yang sangat signifikan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan nasional. Tujuan dari pembangunan daerah adalah untuk mengoptimalkan potensi yang ada dalam suatu wilayah guna mempercepat pertumbuhan dan perkembangan antar daerah di Indonesia. Oleh karena itu, dalam implementasi pembangunan daerah, diperlukan strategi yang efektif untuk memanfaatkan potensi daerah secara maksimal. Hal ini sesuai dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa dalam pelaksanaan pemerintahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan prinsip otonomi dan tugas pembantuan. Tujuannya adalah untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan daerah.

Dalam rangka mengelola keuangan pemerintahan daerah, diperlukan pendanaan yang berasal dari pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah ini dapat diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan usaha milik daerah, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Selain

itu, terdapat sumber pendapatan asli daerah lainnya yang sah untuk menunjang keuangan pemerintah daerah. Salah satu strategi yang dapat diadopsi oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah adalah dengan melakukan eksplorasi dan pengembangan potensi lokal secara optimal. Dengan demikian, potensi yang dimiliki oleh daerah dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan dalam mendukung pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga tercipta kesejahteraan yang merata di berbagai daerah. Terdapat beberapa sektor yang dapat dioptimalkan oleh daerah sebagai sumber pendapatan, antara lain: sektor perdagangan, sektor jasa, sektor pertanian, sektor pariwisata, sektor perkebunan, dan lain-lain. Dalam konteks ini, perhatian peneliti lebih tertuju pada sektor pariwisata yang merupakan kontributor penting dalam pendapatan asli daerah melalui retribusi. Sebagai salah satu pilar ekonomi daerah, sektor pariwisata sangat bergantung pada jumlah kunjungan wisatawan, serta pajak hotel, pajak restoran, dan retribusi lainnya yang diterapkan oleh pemerintah daerah.

Pengembangan sektor pariwisata merupakan suatu prioritas yang penting bagi pemerintah daerah. Hal ini karena potensi besar yang dimiliki oleh industri pariwisata dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkenalkan potensi wisata yang ada di daerah kepada masyarakat luas. Selain itu, sektor pariwisata juga berperan penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber utama dalam menganalisis potensi ekonomi suatu daerah. Potensi yang dimiliki akan dikembangkan dan dikelola untuk meningkatkan pemasukan daerah. PAD

memiliki peran penting dalam perencanaan pemerintahan untuk mengembangkan pembangunan dan ekonomi daerah. Tujuannya adalah agar daerah dapat mandiri tanpa tergantung pada dana atau subsidi dari pemerintah pusat. Menurut penelitian oleh Sebastiana dan Cahyo (2016), kemandirian suatu daerah dalam melaksanakan otonomi dapat tercapai dengan meningkatnya pengeluaran yang dapat dibiayai oleh PAD.

Kabupaten Gunungkidul, yang terletak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan daerah yang memiliki potensi wisata pantai yang berlimpah. Kabupaten Gunungkidul juga dikenal sebagai daerah yang kaya akan potensi ekonomi berbasis objek wisata. Tingginya jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Gunungkidul tercermin dari volume kendaraan yang menuju ke daerah ini. Fenomena ini menjadi subjek yang menarik untuk dipelajari dari perspektif pendapatan di sektor pariwisata.

Penelitian ini dipilih untuk mengungkap potensi pariwisata Gunungkidul karena daerah ini dianggap tidak kalah menarik dibandingkan destinasi wisata terkenal lainnya di Indonesia, seperti Bali dan Mandalika. Bukti dari hal ini dapat ditemukan dalam buku berjudul "Gunung Kidul: The next Bali" yang ditulis oleh Cyrillus Harinowo pada tahun 2022. Faktor-faktor tersebut berperan penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor pariwisata Gunungkidul yang memiliki potensi besar dan menarik untuk pengembangan lebih lanjut. Pariwisata sebagai kegiatan dinamis memberikan dampak positif bagi berbagai bidang usaha yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, kontribusi pendapatan dari retribusi pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gunungkidul untuk tahun 2020-2021 dapat ditemukan pada tabel 1.1 yang

terlampir di bawah ini.

Tabel 1.1
Kontribusi Pendapatan Retribusi Pariwisata Terhadap PAD Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2020-2021

Tahun	Kuartal	Realisasi PAD	Realisasi Retribusi Pariwisata	Kontribusi
2020	1	65.554.502.744,97	3.422.130.600,00	5,22%
	2	45.282.673.590,59	114.306.350,00	0,25%
	3	57.902.781.846,85	2.926.724.385,00	5,05%
	4	59.468.570.363,11	2.725.107.574,62	4,58%
2021	1	49.007.459.878,40	2.908.903.201,38	5,94%
	2	52.116.889.338,45	4.849.454.073,00	9,30%
	3	57.096.812.579,60	613.978.975,00	1,08%

Sumber; Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul, 2021.

Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel 1.1 dari studi yang dilakukan, terdapat ketidakstabilan dalam hasil yang diperoleh. Pada triwulan 1 hingga triwulan 4 tahun 2020, kontribusi retribusi pariwisata menunjukkan angka yang bervariasi. Pada triwulan 1, kontribusi retribusi pariwisata mencapai 5,22%, namun pada triwulan 2 turun drastis menjadi 0,25% akibat dari kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang menyebabkan penutupan objek wisata. Namun, pada triwulan 3 kontribusi pendapatan retribusi pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gunungkidul kembali meningkat menjadi 5,05%, dan pada triwulan 4 mencapai 4,58%. Jika dipertimbangkan dari total pendapatan tahun 2020, kontribusi retribusi pariwisata pantai terhadap PAD hanya sebesar 4%. Selama triwulan pertama tahun 2021, kontribusi pendapatan pariwisata terhadap

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 5,94%, meningkat menjadi 9,30% pada triwulan kedua. Namun, pada triwulan ketiga, kontribusi tersebut turun drastis menjadi hanya 1,08% akibat kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diberlakukan sebagai respons terhadap lonjakan kasus Covid-19 di Kabupaten Gunungkidul.

Penelitian menunjukkan bahwa kontribusi pendapatan pariwisata terhadap PAD selama pandemi Covid-19 cenderung tidak stabil, dengan persentase di bawah 10%. Meski demikian, peran pendapatan pariwisata pantai tetap krusial dalam peningkatan PAD, mengingat pariwisata pantai merupakan ikon wisata utama Kabupaten Gunungkidul. Potensi kontribusi pendapatan pariwisata pantai dapat meningkat seiring dengan pelonggaran mobilitas masyarakat dan penurunan kasus Covid-19 di wilayah tersebut (Wulandari dan Priyastiw, 2022:182).

Pada era globalisasi yang sedang berlangsung, sektor pariwisata memiliki potensi besar sebagai penggerak utama ekonomi global dan merupakan industri yang berdaya saing tinggi. Pariwisata dapat menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi daerah yang mampu mengenali potensi pariwisata mereka, yang pada akhirnya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Dengan pengembangan dan pemanfaatan pariwisata yang optimal, pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat dipercepat. Meskipun demikian, kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah masih jauh dari harapan yang diinginkan.

Salah satu konsekuensi dari kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 adalah menurunnya jumlah pengunjung di sektor pariwisata akibat pembatasan mobilitas. Hal ini juga berdampak pada pendapatan retribusi pariwisata pantai di Kabupaten Gunungkidul, karena sebagian besar pengunjung berasal dari luar daerah. Kondisi yang belum stabil akibat pandemi telah menyebabkan penutupan sementara kawasan objek wisata, sehingga memungkinkan target pendapatan awal tidak dapat tercapai.

Pada periode Tahun 2020-2021, industri pariwisata mengalami tekanan yang signifikan akibat Pandemi Covid-19. Keadaan ini menegaskan bahwa sektor pariwisata rentan terhadap berbagai tantangan, seperti pandemi, bencana alam, serta ancaman keamanan seperti terorisme. Dampak jangka panjang dari pandemi Covid-19 ini akan berpengaruh pada pembangunan destinasi pariwisata yang sehat, aman, dan berkualitas serta strategi pemasaran yang efektif, inovatif, dan teknologi informasi yang optimal.

Pembangunan kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan di Kabupaten Gunungkidul. Sebagaimana sektor lainnya, pembangunan kepariwisataan memerlukan perencanaan yang terstruktur untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini juga merupakan implementasi dari Visi dan Misi Kepala Daerah serta merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul. Selain itu, pembangunan kepariwisataan juga mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata (RIPK) Kabupaten Gunungkidul yang telah diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 3 tahun 2014 tentang rencana induk pembangunan

kepariwisataan daerah Kabupaten Gunung kidul tahun 2014-2025.

Untuk meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah, penerapan strategi revitalisasi wisata pantai menjadi suatu keharusan pasca Pandemi Covid-19 di Kabupaten Gunungkidul. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul terus melakukan upaya untuk mengembangkan kembali daya tarik wisata agar pendapatan retribusi dari pariwisata pantai dapat meningkat dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah melalui proses revitalisasi.

Dengan adanya mekanisme kontrol dan pengendalian yang mantap, pelaksanaan rencana revitalisasi diharapkan memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi isu-isu strategis yang terkait dengan kawasan, baik itu dalam bentuk kegiatan sosial-ekonomi maupun karakter fisik objek wisata pantai. Revitalisasi ini dianggap sebagai instrumen yang membantu mengarahkan dan mengendalikan upaya untuk menciptakan lingkungan objek wisata pantai yang dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan fungsi ekonomi sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Gunungkidul.

Berdasarkan analisis yang telah disampaikan, diketahui bahwa dampak Wabah Pandemi Covid-19 yang terjadi dari tahun 2020 hingga 2021 memiliki dampak yang kecil terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, diperlukan strategi-strategi yang efektif untuk meningkatkan PAD dari sektor pariwisata pasca Pandemi Covid-19 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Salah satu langkah strategis yang mungkin dilakukan adalah melalui revitalisasi destinasi wisata pantai di Kabupaten Gunungkidul pasca pandemi Covid-19. Revitalisasi destinasi wisata pantai menjadi hal yang krusial untuk dikerjakan pasca pandemi Covid-19, karena destinasi wisata

pantai memiliki peran yang signifikan dalam peningkatan PAD di Kabupaten Gunungkidul. Oleh karena itu, penelitian yang berjudul [judul penelitian] akan dilakukan untuk mendalami lebih lanjut mengenai strategi revitalisasi wisata pantai sebagai upaya meningkatkan PAD pasca pandemi Covid-19 di Kabupaten Gunungkidul., yaitu: “Strategi Peningkatan PAD Melalui Revitalisasi Wisata Pantai di Kabupaten Gunungkidul Pasca Pandemi Covid-19.”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi peningkatan PAD melalui revitalisasi kawasan wisata pantai di Kabupaten Gunungkidul Pasca Pandemi Covid-19?
2. Bagaimana analisis SWOT strategi peningkatan PAD melalui revitalisasi kawasan wisata pantai di Kabupaten Gunungkidul Pasca Pandemi Covid-19.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Menganalisis dan mendeskripsikan strategi peningkatan PAD melalui revitalisasi kawasan wisata pantai di Kabupaten Gunungkidul Pasca Pandemi Covid-19.
2. Menganalisis dan mendeskripsikan SWOT strategi peningkatan PAD melalui revitalisasi kawasan wisata pantai di Kabupaten Gunungkidul Pasca Pandemi Covid-19.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat secara teoritik dan praktik.

1. Manfaat Secara Teoritik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan pengetahuan dalam bidang ilmu pemerintahan, terutama pada topik Pendapatan Asli Daerah di sektor pariwisata.

2. Manfaat Secara Praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah

a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan yang berharga serta menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan, terutama bagi Pemerintah Daerah guna meningkatkan potensi Pariwisata sebagai salah satu upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Khususnya terkait dengan pengembangan pariwisata pantai pasca pandemi Covid-19 di Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta..

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan menjadi pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan Pendapatan Daerah (PAD) melalui revitalisasi objek wisata pantai.

pascapandemi covid-19 di Kabupaten Gunungkidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

a. Bagi pengelola

- 1) Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan dalam menangani tantangan yang dihadapi untuk upaya memulihkan sektor pariwisata pantai pasca pandemi covid-19 di Kabupaten Gunungkidul.
- 2) Memberikan kontribusi atau ide kepada pihak manajemen yang dapat digunakan sebagai panduan untuk memulihkan pariwisata pantai setelah pandemi Covid-19 di Kabupaten Gunungkidul.

c. Bagi Masyarakat

- 1) Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan terkait industri pariwisata.
- 2) Memberikan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya sebuah objek wisata dapat memberikan dampak positif pada kesadaran masyarakat lokal dan sekitarnya untuk menjaga serta merawat objek wisata yang terdapat di daerah mereka.
- 3) Referensi ini dapat membantu pembaca dalam menghasilkan ide-ide inovatif untuk meningkatkan pengelolaan dan pengembangan sektor pariwisata di masa mendatang.

E. Tinjauan Pustaka

Tabel 1.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul	Hasil Temuan
1	(Nilawati,2022)	Analisis dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gunungkidul (Jurnal)	Strategi untuk meningkatkan Penerimaan Asli Daerah (PAD) dilakukan melalui penyusunan rencana tindakan untuk percepatan peningkatan PAD dan pelaksanaan rencana tindakan tersebut guna peningkatan Penerimaan Asli Daerah.
2	(Pratiwi,2022)	Strategi Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi Untuk Meningkatkan PAD (Jurnal}	Untuk mencapai target kontribusi sektor pariwisata yang ditetapkan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), diperlukan upaya meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, memperbaiki kualitas birokrasi dan pelayanan publik, serta melakukan pembangunan sarana dan prasarana di setiap objek wisata.
3	(Hisanah, et.al, 2022)	Strategi pemulihan Wisata Pantai Parangtritis Pasca Pandemi Covid-19 Melalui Promosi Kearifan Lokal (Jurnal)	Penciptaan revitalisasi lembaga adat dan pembentukan dewan kesenian daerah perlu dilakukan dengan keterlibatan tokoh adat. Strategi yang dirumuskan perlu berbasis pariwisata berkelanjutan, serta memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku guna membangkitkan kembali kepercayaan wisatawan.
4	(Akmaluddin, 2018)	Analisis dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Gunungkidul.	Pengembangan sektor pariwisata perlu diarahkan secara strategis sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah, serta merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul.
5	(Tia Muli, et.al., 2023)	Analisis Strategi Restribusi Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ada dan menciptakan inovasi baru dengan memperhatikan kearifan lokal sebagai

		Daerah Kabupaten Sikka	faktor pendukung PAD.
6	(Sinarta, 2019)	Strategi Pengembangan Wisata Pantai Untuk meningkatkan PA D GunungkidulJogyakarta	Strategi Pengembangan Objek Wisata Pantai Midodaren Gunungkidul Yogyakarta dapat dilakukan dengan membangun berbagai fasilitas pariwisata yang mendukung kealamian yang ada sebagai daya tarik utama dari pantai Midodaren. Selain itu, promosi melalui berbagai media juga perlu dilakukan untuk meningkatkan minat kunjungan wisatawan.
7	Iskandar, 2020	Strategi Peningkatan PAD melalui Pengembangan Objek Wisata pantai di Kepulauan Selayar	Melakukan pelatihan atau penyuluhan tentang kesadaran pariwisata kepada masyarakat desa agar mereka meningkatkan kepedulian terhadap objek wisata. Selain itu, melakukan promosi melalui berbagai media seperti media sosial, event, majalah, brosur, dan televisi nasional. Selain itu, juga mengundang influencer yang dapat membantu percepatan dalam promosi pariwisata.
8	(Farhani, 2018)	Potensi Objek Wisata Pantai di Kabupaten Gunungkidul Yogyakarta	Ragam potensi pariwisata yang menjanjikan dan berpotensi untuk menjadi aset unggulan Kabupaten Gunungkidul, terus dikembangkan untuk mendukung perkembangan pariwisata di masa depan.
9	(Wandansari, 2021)	Kontribusi Retribusi Objek Wisata Pantai Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah	Pengaruh yang signifikan dari retribusi objek wisata di Pantai terhadap Pendapatan Asli Daerah sangat penting.
10	(Satunimus, 2016)	Strategi Pengelolaan Wisata Pantai Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunungkidul	Pengembangan strategi untuk meningkatkan daya tarik pariwisata telah diimplementasikan melalui pengembangan 6 (enam) Kawasan Strategis Pariwisata (KSP).

Berdasarkan hasil analisis tinjauan pustaka yang telah dilakukan, terlihat bahwa belum ada penelitian yang secara khusus membahas mengenai strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Revitalisasi Wisata Pantai Pasca Pandemi Covid-19 di Kabupaten Gunungkidul. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang menjadi fokus dalam penelitian ini dan akan didalami lebih lanjut dalam bagian pembahasan. Sebelumnya, penelitian yang telah dilakukan hanya membahas strategi pengembangan pariwisata pantai tanpa memperhatikan peningkatan Pendapatan asli daerah. Penelitian sebelumnya telah banyak merumuskan strategi namun belum diimplementasikan secara operasional dengan merumuskan rencana aksi. Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah adanya perumusan strategi yang konkret serta rencana aksi yang terstruktur. Strategi dan rencana aksi ini memiliki arti penting dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena mendorong kebijakan peningkatan PAD yang lebih terencana, dapat diukur, akuntabel, dan berorientasi pada kinerja.

Strategi peningkatan pendapatan asli daerah hanya sebatas rencana aksi, begitu pula dengan penanganan objek wisata pantai dalam mendukung PAD melalui revitalisasi. Revitalisasi hanya bersifat pemulihan secara sektoral, seperti yang dilakukan terhadap objek wisata pantai Parangtritis, namun tidak melibatkan seluruh objek wisata yang ada yang dikelola oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul. Oleh karena itu, penelitian ini dianggap penting untuk dilakukan guna memperbaiki dan mengoptimalkan strategi serta rencana aksi yang telah dirumuskan sebelumnya..

F. Kajian Teori .

Dalam melaksanakan penelitian, adalah penting bagi seorang peneliti untuk memiliki dasar teori yang kuat sebagai acuan dalam memperkuat argumennya maupun sebagai panduan dalam menentukan indikator penelitian. Berikut adalah tinjauan terhadap teori-teori yang relevan dalam penelitian ini.

1. Strategi

Menurut Freddy Rangkuti (2002), strategi didefinisikan sebagai alat yang digunakan untuk mencapai tujuan jangka panjang dengan memperhitungkan program tindak lanjut serta alokasi sumber daya yang tepat (<http://ejournal.stipram.net>). Istilah strategi telah menjadi istilah umum yang sering digunakan untuk menggambarkan berbagai konsep seperti rencana, taktik, atau metode untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Secara mendasar, strategi melibatkan perencanaan dan manajemen untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, strategi harus dilihat bukan hanya sebagai panduan arah, tetapi juga sebagai rencana operasional yang detail. Dalam hal pencapaian tujuan organisasi, strategi harus didukung dengan koordinasi antar tim kerja, tema yang jelas, identifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan yang rasional, efisiensi dalam pengelolaan dana, serta taktik yang efektif dalam mencapai tujuan (Effendy, 2007:32).

Menurut definisi dari Sedarmayanti (2018: 1-2), manajemen diartikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya yang dilakukan oleh anggota organisasi, beserta pemanfaatan semua sumber daya yang tersedia dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sementara menurut Saladin (2004:

01), strategi diartikan sebagai suatu rencana yang komprehensif, terintegrasi, dan menyeluruh yang menghubungkan keunggulan strategi perusahaan dengan berbagai tantangan yang ada di lingkungan, serta dirancang untuk memastikan bahwa tujuan inti perusahaan dapat tercapai melalui implementasi yang tepat oleh seluruh organisasi.

Menurut definisi dari Sedarmayanti (2018: 1-2), manajemen diartikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya yang dilakukan oleh anggota organisasi, beserta pemanfaatan semua sumber daya yang tersedia dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sementara menurut Saladin (2004: 01), strategi diartikan sebagai suatu rencana yang komprehensif, terintegrasi, dan menyeluruh yang menghubungkan keunggulan strategi perusahaan dengan berbagai tantangan yang ada di lingkungan, serta dirancang untuk memastikan bahwa tujuan inti perusahaan dapat tercapai melalui implementasi yang tepat oleh seluruh organisasi.

Strategi dan Kebijakan merupakan landasan strategis yang digunakan oleh Perangkat Daerah (PD) untuk mencapai tujuan jangka menengah yang sesuai dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Pendek (RPJMD). Strategi dan kebijakan ini kemudian digunakan sebagai dasar perumusan kegiatan PD untuk setiap program prioritas. Strategi ini disusun berdasarkan analisis pelayanan PD, isu-isu strategis, tujuan, dan sasaran jangka menengah PD. Dalam Rencana Strategis ini, PD tidak menetapkan Visi dan Misi organisasi. Fokus PD adalah untuk mencapai Visi dan Misi RPJMD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Gunungkidul..

2. Indikator Tujuan dan Sasaran Strategi

Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam melakukan fungsi pendukung pemerintahan di sektor pariwisata, turut mendukung pencapaian misi kedua Pemerintah Daerah, yaitu meningkatkan pembangunan manusia dan mengoptimalkan potensi daerah. Misi ini merujuk pada prinsip-prinsip Sapta Karya ke-3, 4, 5, 6, dan 7 Pemerintah daerah Kabupaten Gunungkidul. Dengan merumuskan tujuan dan sasaran strategis, Dinas Pariwisata memprioritaskan langkah-langkah dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, yang menjadi landasan penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah (PD) selama lima tahun ke depan.

Penyusunan tujuan dan sasaran Jangka Menengah PD merupakan salah satu langkah krusial dalam penyusunan Renstra PD. Dengan perumusan tujuan dan sasaran yang terukur, akan terbentuk arah yang jelas dalam mencapai kinerja yang diharapkan serta mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi. Tujuan diartikan sebagai statement yang menggambarkan tindakan yang perlu dilakukan untuk mengatasi isu-isu strategis yang dihadapi daerah. Proses perumusan tujuan seharusnya merujuk pada konteks pembangunan yang dihadapi oleh Perangkat Daerah, yang nantinya akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang hendak dicapai. Pernyataan tujuan harus mampu memberikan visi yang jelas mengenai hasil yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 tahun ke depan. Tujuan harus realistis dan dapat dicapai sesuai dengan kerangka waktu yang telah ditetapkan.

Tujuan merupakan panduan mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan guna mencapai visi, menjalankan misi, menyelesaikan masalah, dan mengatasi isu-isu strategis yang dihadapi di daerah. Dalam upaya mewujudkan visi dan melaksanakan misi pembangunan daerah, Dinas Pariwisata telah menetapkan tujuan utama pembangunan untuk periode 5 tahun ke depan. Sasaran merupakan hasil yang diinginkan dari setiap tujuan yang dirumuskan dengan cara yang dapat diukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional, sehingga dapat direalisasikan dalam jangka waktu tersebut. Proses perumusan sasaran dilakukan dengan mempertimbangkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator tersebut. Sasaran tersebut merupakan pencapaian yang lebih terperinci, terukur, spesifik, mudah dicapai,

dan rasional, yang akan diwujudkan dalam kurun waktu 5 tahun mendatang.

Strategi sasaran terkait pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul DIY direkayasa ulang sebagai respons terhadap dampak pandemi Covid-19 yang bermula pada akhir 2019, ketika terjadi wabah virus Corona di Wuhan, Cina. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) kemudian mengumumkan wabah ini sebagai pandemi global pada tanggal 11 Maret 2020. Negara-negara yang terdampak, seperti Amerika, Spanyol, dan Italia, mengalami peningkatan kasus Covid-19, yang berdampak negatif pada situasi ekonomi global. Lembaga-lembaga seperti International Monetary Fund (IMF) bahkan memprediksikan terjadinya penurunan ekonomi global tahun 2020 sebesar 3% (Restra Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul, 2022:44).

Rincian indikator tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul dapat dilihat pada tabel 1.3 di bawah ini.

Tabel 1.3
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Daya saing pariwisata meningkat 2026	Daya saing pariwisata Meningkat	Peningkatan promosi dan pemasaran pariwisata berbasis ekonomi kreatif, peningkatan kualitas SDM dan peningkatan fasilitas destinasi pariwisata	Menyelenggarakan kegiatan promosi dan pemasaran wisata berbasis ekonomi kreatif untuk meningkatkan kualitas SDM secara efektif dan tepat sasaran
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat	Mengarahkan dan mengkoordinasikan seluruh bidang	Meningkatkan koordinasi penunjang

	daerah	bekerja sesuai SOP	urusan Perangkat Daerah
--	--------	--------------------	-------------------------

3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a. Pengertian PAD

Berdasarkan Undang - Undang No 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain yang sah. PAD bertujuan untuk mendukung kekeluargaan daerah dalam memperoleh pendanaan dan menjalankan otonomi daerah sebagai bagian dari desentralisasi. Beberapa sumber PAD meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan lain yang sah (Wulandari dan Priyastiwi, 2022:179).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh suatu daerah melalui berbagai kegiatan dan layanan kepada masyarakat serta pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Pasal 1 Ayat 20, PAD dapat didefinisikan sebagai pendapatan daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. PAD merupakan salah satu pilar utama dalam perekonomian daerah yang didasarkan pada analisis potensi ekonomi lokal. Potensi asli daerah ini nantinya akan dikembangkan dan dilakukan pengelolaan. Jika

potensi ini berhasil dikembangkan, hasil yang diperoleh nantinya juga akan menjadi pemasukan daerah itu sendiri. PAD berperan dalam melaksanakan perencanaan pemerintahan sebagai upaya untuk mengembangkan pembangunan dan meningkatkan perekonomian suatu daerah. Hal ini dimaksudkan agar daerah tidak menggantungkan pendanaan dan subsidiya dari pemerintah pusat. Menurut Sebastiana dan Cahyo (2016), semakin besar pengeluaran yang bisa dibiayai dengan pendapatan asli daerah, maka semakin tinggi tingkat kemandirian suatu daerah melaksanakan otonomi.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peran penting sebagai sumber keuangan daerah. Menurut Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari dalam wilayahnya, dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan hukum yang berlaku, dan berasal dari ekonomi asli daerah yang terbagi menjadi empat jenis pemasukan, yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan, dan Pendapatan Lain-Lain yang Sah. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah untuk mencari sumber dana sebagai implementasi otonomi daerah dan desentralisasi. Penelitian ini difokuskan pada sumber penerimaan PAD dari pajak daerah dan retribusi daerah. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, terdapat berbagai jenis pajak dan retribusi yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang harus dibayarkan oleh orang pribadi atau badan sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku. Dalam hal ini, imbalan yang diterima oleh wajib pajak tidak langsung diterima kembali, namun akan digunakan untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat sebesar-besarnya.

Pasal 1 dan 2 Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa pajak daerah dapat dibedakan menjadi dua kategori:

- 1) Pajak Provinsi yang terdiri dari pajak kendaraan bermotor, pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor (pajak balik nama), pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok.
- 2) Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral ukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung wallet, pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan, serta beaperolehan hak atas tanah dan/ bangunan.

b. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, terdiri atas:

a. Hasil Pajak Daerah

a) Dasar Hukum

Penarikan pajak daerah didasarkan pada peraturan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.

b) Pengertian Pajak Daerah

Kontribusi wajib yang dikenakan kepada individu atau entitas oleh pemerintah daerah tanpa imbalan yang langsung sebanding yang dapat di enforce berdasarkan peraturan hukum yang berlaku. Kontribusi ini digunakan untuk mendukung pengelolaan pemerintahan daerah dan pembangunan di wilayah tersebut.

c) Jenis-jenis Pajak

Pajak yang dipungut oleh Kabupaten, terdiri atas:

- (1) Pajak hotel
- (2) Pajak hiburan
- (3) Pajak restoran
- (4) Pajak reklame
- (5) Pajak penerangan jalan
- (6) Pajak pengambilan bahan galian golongan C
- (7) Pajak parker
- (8) Pajak lain-lain.

b. Hasil Retribusi Daerah

Retribusi daerah merujuk pada jenis pungutan yang dibayarkan kepada Pemerintah Daerah sebagai imbalan atas layanan atau izin tertentu yang disediakan dan/atau diberikan untuk kepentingan individu atau badan usaha.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang terpisah dari laba BUMD atau penyertaan modal, serta bagian laba dari penyertaan modal di perusahaan swasta atau koperasi.

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Beberapa contoh pendapatan asli daerah lainnya yang sah meliputi hasil penjualan aset daerah, pendapatan bunga, keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan, dan sumber pendapatan lainnya yang diperoleh dari penjualan barang atau jasa oleh daerah..

4. Revitalisasi

a. Pengertian Revitalisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 18 tahun 2010 mengenai Pedoman Revitalisasi Kawasan, Revitalisasi didefinisikan sebagai langkah yang bertujuan untuk meningkatkan nilai lahan atau kawasan melalui proses pembangunan ulang di suatu area yang dapat meningkatkan fungsi dari kawasan tersebut sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya (pasal 1 ayat 1). Kawasan sendiri merujuk pada suatu wilayah yang memiliki fungsi utama dalam bidang perlindungan atau pengembangan (pasal 1 ayat 4).

Revitalisasi merupakan suatu usaha untuk menghidupkan kembali suatu kawasan atau bagian kota yang sebelumnya mengalami kemunduran atau degradasi. Proses revitalisasi dapat dilakukan pada skala makro maupun mikro, dan melibatkan perbaikan aspek fisik, ekonomi, dan sosial. Pendekatan dalam revitalisasi harus mampu mengidentifikasi serta memanfaatkan potensi lingkungan, seperti sejarah, keunikan lokasi, dan citra tempat) (Danisworo, 2012).

Revitalisasi bukan hanya berkaitan dengan peningkatan estetika fisik, tetapi juga melibatkan peningkatan ekonomi masyarakat dan pemertahanan identitas budaya. Untuk berhasil melakukan revitalisasi, peran aktif masyarakat sangat penting. Keterlibatan masyarakat tidak hanya sebatas formalitas, tetapi juga melibatkan berbagai elemen masyarakat di sekitar dan luar lingkungan tersebut. Dalam pelaksanaannya, mekanisme pengendalian yang terstruktur dan terkoordinasi harus digunakan untuk mengatasi isu-isu strategis, baik dalam aspek sosial-ekonomi maupun fisik kawasan.

Merancang kota menjadi aspek penting dalam menciptakan lingkungan yang responsif terhadap kebutuhan dan fungsi baru.

b. Tujuan dan Sasaran Revitalisasi

1) Tujuan Revitalisasi

Tujuan dari revitalisasi kawasan adalah untuk meningkatkan vitalitas kawasan yang telah dibangun melalui intervensi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, menjaga stabilitas, terintegrasi dengan sistem kota, layak huni, berkeadilan sosial, serta memiliki kesadaran akan budaya dan lingkungan yang ada.

2) Sasaran Revitalisasi Kawasan

a) Peningkatan stabilitas ekonomi wilayah melalui intervensi yang dilakukan:

(1) Meningkatkan kegiatan yang dapat memperluas kesempatan kerja, meningkatkan diversifikasi usaha, serta produktivitas kawasan.

(2) Meningkatkan faktor-faktor yang mendorong peningkatan produktivitas kawasan.

(3) Mengurangi jumlah modal keluar kawasan dan meningkatkan arus investasi masuk ke dalam kawasan. Mengembangkan penciptaan iklim yang kondusif bagi kontinuitas dan kepastian usaha.

b) Peningkatan nilai properti di suatu kawasan dapat dicapai dengan mengurangi berbagai faktor eksternal yang dapat menghambat pertumbuhan kawasan tersebut. Hal ini bertujuan untuk membuat nilai properti di kawasan tersebut sesuai dengan nilai pasar dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi jangka panjang.

- c) Terintegrasi dengan baik antara kantong-kantong kawasan kumuh yang terisolir dengan sistem kawasan dari segi spasial, prasarana, sarana, serta kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya.
- d) Meningkatnya jumlah dan kualitas prasarana lingkungan seperti jalan dan jembatan, pasokan air bersih, sistem drainase, sanitasi dan pengelolaan sampah, serta fasilitas kawasan seperti pasar, area industri, ruang ekonomi formal dan informal, fasilitas sosial dan budaya, serta transportasi.
- e) Meningkatnya kelengkapan fasilitas kenyamanan (amenity) kawasan guna mencegah proses kerusakan ekologi lingkungan.
- f) Terciptanya pelestarian aset warisan budaya perkotaan dengan mencegah terjadinya "perusakan diri-sendiri" (self- destruction) dan "perusakan akibat kreasi baru" (creative-destruction), melestarikan tipe dan bentuk kawasan, serta mendorong kesinambungan dan tumbuhnya tradisi sosial dan budaya lokal.
- g) Penguatan kelembagaan yang mampu mengelola, memelihara dan merawat Kawasan Revitalisasi.
- h) Penguatan kelembagaan yang meliputi pengembangan SDM, kelembagaan dan peraturan/ ketentuan perundang-undangan.
- i) Membangun kesadaran dan meningkatkan kompetensi Pemda agar tidak hanya fokus membangun kawasan baru.

c. Indikator Revitalisasi

Sebagai proses yang kompleks, revitalisasi melalui serangkaian tahapan yang membutuhkan waktu tertentu dan mencakup hal-hal berikut:

1) Intervensi Fisik

Berdasarkan hubungan yang erat antara citra kawasan dengan aspek visualnya, terutama dalam menarik kegiatan dan pengunjung, tindakan fisik perlu dilakukan dalam upaya revitalisasi kawasan. Revitalisasi ini dimulai dengan intervensi fisik yang dilakukan secara bertahap, meliputi berbagai aspek seperti produk wisata, pemasaran, akomodasi, perhubungan, rumah makan/hotel, daya tarik, Tour Operator, fasilitas, pendukung, dan regulasi. Selain itu, isu lingkungan juga menjadi fokus penting dalam upaya ini, sehingga intervensi fisik harus mempertimbangkan konteks lingkungan. Perencanaan fisik harus tetap mempertimbangkan aspek jangka panjang.

2) Rehabilitasi Ekonomi

Revitalisasi yang dimulai dengan proses peremajaan artefak urban harus secara proaktif mendukung rehabilitasi kegiatan ekonomi. Untuk mencapai tujuan ini, dalam konteks revitalisasi diperlukan pengembangan fungsi campuran yang dapat menggairahkan aktivitas ekonomi dan sosial, serta memunculkan vitalitas baru.

3) Revitalisasi Sosial/Institusional

Revitalisasi suatu kawasan akan berhasil apabila mampu menciptakan lingkungan yang menarik dan berdampak positif bagi dinamika serta kehidupan sosial masyarakat. Proses perencanaan dan

pembangunan kawasan harus difokuskan pada menciptakan lingkungan sosial yang berjiwa (place making) dan dukungan pengembangan institusi yang kuat menjadi faktor penting untuk mencapai tujuan tersebut (Hisanah,et.al, 2022:6).

5. Kepariwisata

a. Pengertian Pariwisata

Asal usul istilah pariwisata berasal dari bahasa Sanskerta, di mana komponen-komponennya terdiri dari: "Pari" yang mengartikan penuh, lengkap, berkeliling; "Wis(man)" yang berarti rumah, properti, kampung, komunitas, dan "ata" yang berarti pergi terus-terusan, mengembara (roaming about). Ketika kata-kata ini digabungkan, mereka membentuk konsep rumah (kampung) berkeliling tanpa henti dan tanpa niat untuk menetap di tempat tujuan perjalanan (Suwanto,2018).

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, pariwisata adalah segala kegiatan wisata yang didukung oleh fasilitas dan layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Sementara itu, kepariwisataan adalah usaha yang berfokus pada pelayanan dan memenuhi kebutuhan wisatawan yang berpergian atau sedang menjalani perjalanan wisata.

b. Wisatawan

Wisatawan merujuk kepada seseorang yang melakukan perjalanan wisata dari tempat tinggalnya ke destinasi lain untuk tujuan rekreasi, pengembangan diri, atau penjelajahan keunikan daya tarik wisata lokal.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 mendefinisikan wisatawan sebagai individu atau kelompok yang melakukan perjalanan untuk sementara waktu. Wisatawan terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara. Wisatawan domestik adalah warga negara yang melakukan perjalanan wisata tanpa meninggalkan batas wilayah negara asalnya, sedangkan wisatawan mancanegara adalah orang asing yang berkunjung ke negara lain untuk tujuan wisata. Hubungan antara jumlah wisatawan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) penting untuk dipahami, karena sektor pariwisata berperan penting dalam meningkatkan kontribusi PAD di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ketersediaan berbagai objek wisata dan kekayaan budaya lokal yang ditawarkan memberikan daya tarik bagi wisatawan domestik maupun internasional untuk mengunjungi dan menikmati keindahan destinasi tersebut. Tingginya jumlah kunjungan wisatawan menciptakan dampak positif terhadap perekonomian lokal, melalui pengeluaran wisatawan yang berkontribusi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pembayaran pajak dan retribusi daerah. Dana yang terkumpul akan digunakan oleh Pemerintah Daerah Gunung Kidul, Provinsi DIY, untuk pembangunan ekonomi lokal, khususnya dalam peningkatan fasilitas dan pelayanan pariwisata.

c. Wisata Pantai

Pantai merupakan perbatasan antara daratan dan laut, sementara laut merupakan kumpulan air dalam jumlah besar yang memisahkan daratan menjadi benua dan pulau-pulau. Wisata pantai dapat dijelaskan sebagai kegiatan wisata yang mengoptimalkan sumber daya alam pantai beserta segala komponen pendukungnya, baik itu alami maupun buatan, atau kombinasi keduanya (Marpaung, 2012). Wisata Bahari adalah jenis kegiatan wisata atau refreshing yang berhubungan dengan air pantai, laut, dan danau. Wisata bahari mencakup kegiatan berenang, snorkeling, menyelam, surfing, memancing, berjemur, rekreasi pantai, fisiografi bawah air, dan lain-lain.

6. Pandemi Covid-19

Berdasarkan penelitian, Covid-19 atau virus corona 2019 merupakan sekelompok virus yang menyerang sistem pernapasan manusia dan dapat menyebabkan infeksi pada paru-paru (pneumonia). Menurut informasi dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), virus corona merupakan keluarga besar virus yang dapat menimbulkan penyakit pada hewan maupun manusia. Virus corona telah diketahui menyebabkan berbagai infeksi pernapasan pada manusia, mulai dari gejala flu biasa hingga penyakit yang lebih serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)* dan *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)*.

G. Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah penjelasan yang digunakan untuk memahami konsep yang akan disajikan guna meningkatkan pemahaman dan pemikiran.

1. Strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan serangkaian perencanaan dan manajemen yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah pada Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul Provinsi Yogyakarta.

2. Upaya revitalisasi pariwisata pantai pasca pandemi Covid-19 merupakan strategi untuk mengembalikan vitalitas dan daya tarik kawasan atau wilayah yang sebelumnya mengalami kemunduran akibat dampak pandemi Covid-19.

H. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah objek pelaksanaan yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk mengetahui strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui revitalisasi wisata pantai pasca pandemi Covid-19 oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul Provinsi Jogjakarta. Informasi ini didapatkan penulis dari Perubahan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul tahun 2021-2026 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Variabel	indikator	Parameter
Daya saing pariwisata meningkat	<ol style="list-style-type: none"> a. Menyelenggarakan kegiatan Promosi dan pemasaran pariwisata berbasis ekonomi kreatif b. Meningkatkan kualitas SDM c. Meningkatkan fasilitas destinasi pariwisata 	<ol style="list-style-type: none"> a. Nilai belanja wisatawan b. Jumlah kunjungan wisatawan
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Mengarahkan dan mengkoordinasikan seluruh bidang kerja Perangkat Daerah sesuai SOP	Nilai AKIP Perangkat Daerah

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui revitalisasi pariwisata di Pantai Gunung Kidul pasca pandemi Covid-19, yang dilakukan di Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,

2. Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian ini adalah strategi peningkatan PAD melalui revitalisasi wisata pantai pasca pandemic covid-19. Subjek penelitiannya adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Gunung Kidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data primer penelitian ini strategi peningkatan PAD melalui revitalisasi wisata pantai pasca pandemic covid-19. Subjek penelitiannya adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Gunung Kidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Teknik pengumpulan data sekunder yang dilakukan meliputi studi pustaka, dokumentasi, dan memanfaatkan teknologi informasi internet untuk memuat informasi yang berkaitan dengan pembahasan dan juga relevan untuk menjadi referensi penulisan ini.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini bertujuan untuk mengolah data yang dikumpulkan dari lapangan atau kegiatan pengumpulan data. Analisis data tidak hanya dilakukan setelah penelitian selesai, tetapi juga selama proses penelitian. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan efektivitas kegiatan penelitian dan mendapatkan data yang valid. Referensi digunakan sebagai sumber data dalam penelitian ini.

Dalam penelitian kualitatif, fokus utama adalah pada analisis data. Hasil temuan atau data dianggap valid ketika tidak terdapat perbedaan signifikan antara apa yang dilaporkan oleh peneliti dengan apa yang diketahui dari partisipan. Pengembangan data dilakukan melalui teknik triangulasi. Menurut Sugiyono (2015), langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis data kualitatif meliputi: [masukkan langkah-langkah yang sesuai dengan konteks penelitian].

- a. Tahap pengumpulan data (*Data Collection*)
- b. Tahap Reduksi Data (*Data Reduction*)
- c. Tahap penyajian data (*Data Display*)
- d. Tahap penarikan kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*).

5. Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah sebuah evaluasi terhadap kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (Strength, Weakness, Opportunity, and Threats) dalam sebuah organisasi. Analisis ini melibatkan pemantauan lingkungan internal dan eksternal. Analisis SWOT digunakan sebagai teknik perencanaan strategis yang berguna untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan organisasi, serta peluang dan ancaman yang dihadapi dalam suatu proyek, baik yang sedang berlangsung maupun dalam perencanaan baru (Hendro, 2020:126). Proses pengambilan keputusan strategis selalu terkait dengan pengembangan misi, tujuan, strategi, dan kebijakan. Metode analisis SWOT merupakan sebuah alat yang tepat untuk mengidentifikasi masalah dari berbagai sudut pandang, dengan aplikasi yang luas dalam berbagai situasi:

- a. Bagaimana kekuatan (*strengths*) mampu mengambil keuntungan dari sebuah peluang (*opportunities*) yang ada.
- b. Bagaimana cara mengatasi kelemahan (*weaknesses*) yang mencegah keuntungan.
- c. Bagaimana kekuatan (*strengths*) mampu menghadapi ancaman (*threats*) yang ada.
- d. Bagaimana cara mengatasi kelemahan (*weaknesses*) yang mampu membuat ancaman (*threats*) menjadi nyata atau menciptakan sebuah ancaman baru.

Keberhasilan implementasi strategi sangat tergantung

pada sejauh mana strategi tersebut mampu menyesuaikan diri dengan dinamika lingkungan, persaingan, dan kondisi internal perusahaan.